



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i1.129>

Analisis Kinerja Pemerintah Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Dalam Pembangunan Desa dari Tahun 2015-2019

¹⁾Edward Mandala, ²⁾Suhardi Mukhlis, ³⁾Junriana, ⁴⁾Mahesty, ⁵⁾Iip Ilham Firman, ⁶⁾Agus Sujono

^{1), 2), 3), 4), 5), 6)}Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji

Email: edward_mandala@gmail.com, riana_zamzam@gmail.com

Abstract

Cemaga Village is one of the cities in Natuna Regency, which has the potential for the tourism industry, especially Akar Island. For the construction and development of the Root Island tour, a budget of 2,625,081,000.00 is budgeted. But the phenomenon that occurs is, access is inadequate. In this case, the Cemaga Village government is required to have high performance to be able to solve development problems in its territory. The purpose of this research is to determine the performance of the Cemaga Village Government, South Bunguran District, Natuna Regency in Village Development from 2015-2019. This research method is descriptive with a qualitative approach. The population in this study were the Cemaga Village Community, Bunguran Selatan District, Natuna Regency, namely 929 people, and 11 village apparatus. While the samples were 1 village head, 1 development section head, 1 village secretary, and 2 community and community leaders, so that the total sample size was 5 people. The data in this study were obtained from observations and structured interviews. Data analysis was performed using a qualitative descriptive technique. The results of this study are the Performance Analysis of the Government of Cemaga Village, South Bunguran District, Natuna Regency in Village Development for the 2015-2019 Study on Akar Island is not good. The advice that can be given in this study is that the government must make careful planning and involve the community so that it is more targeted, and the community must maintain the results of development.

Keywords: Analysis, Performance, Village Government, Village Development, Natuna District

Abstrak

Desa Cemaga merupakan salah satu kota di Kabupaten Natuna, yang memiliki potensi industri wisata khususnya Pulau Akar. Untuk pembangunan dan pengembangan wisata pulau akar dianggarkan sebesar 2.625.081.000,00. Namun fenomena yang terjadi adalah, akses belum memadai. Dalam hal ini, pemerintah Desa Cemaga dituntut memiliki kinerja yang tinggi untuk dapat menyelesaikan masalah pembangunan di wilayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Dalam Pembangunan Desa Dari Tahun 2015-2019. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna yaitu 929 orang, serta aparatur desa sebanyak 11 orang. Sementara yang menjadi sampel adalah 1 orang kepala desa, 1 orang kepala seksi pembangunan, 1 orang sekretaris desa, dan masyarakat serta tokoh masyarakat yang berjumlah 2 orang, sehingga keseluruhan jumlah sampel adalah 5 orang. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Analisis Kinerja Pemerintah Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Dalam Pembangunan Desa Tahun 2015-2019 Studi Pada Pulau Akar kurang baik. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang dan melibatkan masyarakat agar lebih tepat sasaran, dan Masyarakat harus menjaga hasil-hasil dari pembangunan.



PENDAHULUAN

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented maupun non profit oriented, yang dihasilkan selama satu periode waktu. Kinerja juga merupakan refleksi dari sikap pribadi seseorang individu atau sekelompok orang tentang pekerjaan atau kerjasama, seperti sikap pegawai dalam bekerja dan kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Kehadiran pemerintah desa dinilai memegang peranan penting karena memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Hal ini diperkuat karena pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki kinerja yang baik, hal ini dikarenakan, jika kinerja pemerintah desa baik, maka setiap program khususnya pembangunan dan pelayanan dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang sejahtera. Tinjauan tentang desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentang Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pembangunan di desa sebaiknya bersifat *bottom up*. *Bottom Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan untuk menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya adalah memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan.

Desa Cemaga merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Natuna, desa ini berada di Kecamatan Bunguran Selatan. Fenomena yang terjadi adalah pembangunan di Desa Cemaga ini perlu perbaikan. Di Desa Cemaga memiliki potensi wisata yaitu Pulau Akar, pulau ini memiliki jarak sekitar 50 meter dari bibir pantai di Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam RPJMDes Desa Cemaga dijelaskan bahwa untuk pengembangan pariwisata tingkat desa yakni pembangunan dan pengembangan wisata pulau akar dianggarkan dengan total anggaran 2.625.081.000,00. Namun fenomena yang terjadi adalah, akses belum memadai, seperti masih ada jalan yang rusak, kemudian

pembangunan fasilitas umum untuk wisatawan masih minim serta pembangunan infrastruktur yang masih perlu perbaikan. Jika dilihat dari anggaran 2.625.081.000,00 hanya menghasilkan Gazebo, jembatan, dan pembangunan wahana selfi kemudian dibangun juga Kantin. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa analisa terhadap kinerja pemerintah desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Dalam Pembangunan Desa Dari Tahun 2015-2019 sangat penting dilakukan.

Berdasarkan penelitian Maya Rosalina (2013) tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah desa. untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif perlu adanya partisipasi masyarakat yang pro aktif untuk mendukung pembangunan di desa.

Kemudian dalam penelitian Sofyanto Torau (2019) tentang Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam rangka pembangunan masyarakat desa sudah cukup baik, dengan beberapa indikator yang dikemukakan oleh Bernardin dan Russel yakni kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan kerja, kerjasama, kreativitas dan kualitas pribadi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan sehingga masih perlu ditingkatkan. Adapun indikator yang belum tercapai adalah pengetahuan kerja dan kreativitas pemerintah desa yang masih kurang dalam pelaksanaan pembangunan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan menggunakan konsep kinerja yang dikemukakan oleh Yuwono, dkk (2005 : 36) dimana kinerja mengukur antara yang direncanakan dengan pencapaian hasil akhir yang dapat dilihat dari indikator dalam keberhasilan suatu program yaitu : *Input, Proses, Output, dan Outcomes*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Dalam Pembangunan Desa Dari Tahun 2015-2019. Penelitian ini penting dilaksanakan karena pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pelayanan publik, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu kinerja pemerintah Desa Cemaga dalam pembangunan perlu dianalisa.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja

Kinerja (Performace) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyaikriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan, atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target,kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Menurut Mahsun (2006:25) mendefinisikan kinerja (Performance) sebagai suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan asaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategicplanning suatu organisasi.

Dalam sebuah organisasi pemerintahan, maka pegawai dituntut untuk dapat memiliki atau mempunyai kinerja yang baik dan berkualitas, sehingga tugas dan fungsi dari Aparatur Sipil Negara, yaitu sebagai abdi masyarakat dan pengayom masyarakat memang betul-betul tercapai dan terpenuhi, selain itu ditujukan agar pegawai itu profesional. Sedarmayanti (2003:147), menyatakan bahwa: " Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab mereka miliki masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku".

Sedangkan Triton (2005:95), menyatakan " kinerja merupakan evaluasi terhadap kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi dan partisipasi sebagai konstribusi keseluruhan yang diberikan oleh individu bagi organisasi. Soeprihanto (2001:7) berpendapat " kinerja pegawai adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan". Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang pegawai atau oleh sekelompok orang dalam satu unit kerja dalam organisasi, sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Mathis dan Jackson (2002:78), menyatakan bahwa:

"...Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk:

- (1) kuantitas output.
- (2) kualitas output.
- (3) jangka waktu output.
- (4) kehadiran ditempat kerja.
- (5) sikap kooperatif”.

Menurut Yuwono, dkk (2005 : 36) dimana kinerja mengukur antara yang direncanakan dengan pencapaian hasil akhir yang dapat dilihat dari indikator dalam keberhasilan suatu program yaitu :

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan atau program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan input. Misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Proses (Process) adalah kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan penyerapan anggaran, dengan tujuan menjaga agar yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
4. Hasil (outcomes) segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kinerja merupakan pengukuran secara berkala terhadap efektifitas kegiatan organisasi, bagian organisasi dan anggota organisasi berdasarkan tujuan, standar dan ketentuan yang telah ditetapkan (Zudia, 2010). Menurut Sinambela (2012:181) kinerja organisasi merupakan kumulatif kinerja pegawai, oleh karenanya semakin tinggi kinerja pegawai akan semakin tinggi pula kinerja organisasi.

Menurut Dwiyanto yang dikutip dalam Rinah, Sri Ambar (2020) mengemukakan terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja Organisasi:

1. Produktifitas: Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Dalam hal ini konsep ukuran produktivitas yaitu dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memberikan hasil yang diharapkan.
2. Kualitas Layanan: Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja karena

informasi kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah yang dapat diperoleh melalui media massa.

3. Responsivitas: kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang rendah menunjukkan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah, dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
4. Responsibilitas: menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implicit.
5. Akuntabilitas: Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten dengan kehendak masyarakat. suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Pemerintah Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desa yaitu: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemerintahan desa, lembaga pemerintahan terbagi ke dalam 2 (dua) lembaga yaitu: Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang nantinya apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada good governance. Menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa meliputi:

1. Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pembinaan kemasyarakatan desa.
3. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan menurut Siagian (2001:2-3) adalah:

"...suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan tugas."

Sedangkan menurut Tjokromidjojo (2000:7) yang dimaksud dengan pembangunan adalah keseluruhan dari proses kegiatan pengendalian usaha untuk merealisasikan pertumbuhan yang berencana kearah modernisasi serta kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial/masyarakat yang berencana kearah kemajuan yang menyangkut berbagai segi kehidupan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Sedangkan pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sistematis dan terarah sebagai usaha pembangunan negara yang menyeluruh. Infrastruktur adalah padanan dari kata prasarana, infrastruktur artinya wujud modal publik (public capital) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuasi kualitatif. Menurut Burhan Bungin (2008 : 68) kuasi kualitatif, sifatnya tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya, penekanannya pada deskriptif menyebabkan format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masukan (*Input*)

Dari penjelasan beberapa informan maka dimaknai bahwa sumber daya manusia adalah ujung tombak keberhasilan dari pembangunan desa Cemaga khususnya Pulau Akar, aparatur desa sudah menggali kemampuannya untuk memajukan Pulau Akar sebagai tempat wisata di Desa Cemaga, dimana aparatur desa jelas menyatakan siap untuk membangun pulau akar di desa Cemga ini. Karena output yang diharapkan adalah supaya ekonomi didaerah terebut khususnya desa cemaga agar bisa lebih baik kedepannya.

Berdasarkan hasil observasi maka ditemukan bahwa ada tim khusus dalam pembangunan ini, dimana di susun mulai dari kepala desa, ketua BPD serta aparatur desa dan masyarakat yang kesemuanya dipilih sesuai dengan kemampuannya. Dari semua penjelasan informan bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia mengatakan siap, karena dengan majunya pembangaunan pariwisata di pulau akar akan berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Para pimpinan desa sudah melakukan upaya seoptimal mungkin dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Seringkali dalam proses perencanaan pembangunan, tidak menghasilkan sebuah perencanaan yang baik, atau perencanaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat.

Proses (*Process*)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa di Desa Cemaga, pemerintah desa sudah melakukan penyusunan agenda apa saja yang akan dilakukan, dengan menampung aspirasi masyarakat, namun memang pelaksanaan dari perumusan masalah kebijakan hingga penyusunan agenda kadang tidak sesuai hal ini dikarenakan, apa yang sudah teridentifikasi di tahap awal, kemudian di saring kembali untuk melihat yang lebih prioritas dan kecukupan dana.

Pembangunan desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa.

Keluaran (*Output*)

Objek wisata berbasis masyarakat merupakan suatu bentuk wisata yang mengedepankan kepemilikan dan peran aktif masyarakat, memberikan edukasi

kepada masyarakat lokal maupun pengunjung, mengedepankan perlindungan kepada budaya dan lingkungan, serta memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat lokal. Sebagai sebuah konsep pengembangan objek wisata, wisata berbasis masyarakat bukanlah konsep yang kaku, penerapan konsep objek wisata berbasis masyarakat harus disesuaikan dengan karakteristik suatu destinasi, baik kondisi maupun fisik. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa Pembangunan yang paling penting dari pulau akar ini adalah batu miring mengingat pulau akar ini merupakan pulau yang sangat kecil yang hanya memiliki diameter 250 meter. , renovasi jembatan, gazebo, fasilitas kantin atau lapak untuk berjualan dan tempat masyarakat untuk membeli kebutuhan untuk berkunjung dipulau tersebut.

Hasil (*outcomes*)

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa sudah ada pembangunan seperti batu miring yang di bangun menggunakan dana desa telah direalisasikan, walaupun batu merengnya belum 100%. Ini dapat dilihat setelah peneliti melakukan observasi langsung di lokasi, peneliti menemukan bahwa batu miring tersebut belum mengelilingi seluruh pulau akar. Jika dilihat dari segi kebermanfaatan untuk pulau itu sendiri sangat baik untuk melindungi dari abrasi, sehingga kapasitas pasir di bibir pulau akar tetap terjaga. Untuk masyarakat juga mendapatkan manfaat dari batu miring tersebut dikarenakan, jika ingin mengelilingi pulau akar, pengunjung meniti di atas batu miring tersebut.

Kemudian Gazebo juga merupakan bagian penting penunjang aspek wisata. Dilihat dari sisi aspek kebermanfaatan gazebo sangat bermanfaat untuk para pengunjung, untuk berteduh dari sinar matahari dan hujan. Fasilitas ini disediakan oleh pemerintah desa secara gratis, sehingga masyarakat tidak perlu membayar iuran, karena gazebo ini di bangun dari pemerintah desa. Tidak hanya itu kantin yang juga disediakan oleh pemerintah desa juga di untukkan bagi masyarakat yang ingin berjualan untuk mencari nafkah. Memang di kantin ini tidak semua masyarakat yang bisa berjualan dikarenakan kapasitas kantin masih terbatas. Namun dengan adanya kantin, baik masyarakat umum maupun sudah sangat terbantu karena ada transaksi jual beli yang memudahkan antara kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa pembangunan sudah diarahkan untuk peningkatan kualitas masyarakat, namun beberapa pembangunan yang sudah menjadi permasalahan sejak lama tidak mampu dituntaskan, padahal pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, pengairan, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan

mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Berdasarkan hasil observasi beberapa pembangunan sudah dirasakan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya adalah gazebo sebagai berikut jika dilihat ini adalah salah satu yang dibangun ini sudah mampu dimanfaatkan oleh masyarakat, meskipun masih kurang lapak tempat buka usaha yang mana fasilitasnya hanya satu yang diberikan. Sehingga hanya orang-orang itu saja yang memakai fasilitas itu, siapa cepat dia dapat. Tidak hanya lapak, pemerintah harus memudahkan proses perizinan supaya masyarakat mampu memulai proses usaha. Dalam pembangunan desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Selain itu, sasaran pembangunan ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga timbul rasa tanggung jawab dalam proses pembangunan yang efektif dan efisien. Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan pedesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai hasil akhir dari pembangunan tersebut. Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik sebagai fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan sarana dan prasarana seperti penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan gedung ibadah dan pemerintahan, transportasi serta pelayanan pelayanan serupa untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi.

Semua hasil pembangunan merupakan wujud tanggungjawab pemerintah pada masyarakat yang perlu dibanggakan dengan cara dimanfaatkan secara maksimal dengan penuh tanggungjawab dan rasa memiliki. Masyarakat juga harus menjaga dan pembangunan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Keterlibatan atau keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan partisipasi pada setiap program pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran atau pemberian ide-ide keterlibatan secara fisik atau tenaga, serta ikut merasakan hasil-hasil program pembangunan itu sendiri. Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari

proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis Kinerja Pemerintah Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Dalam Pembangunan Desa Tahun 2015-2019 Studi Pada Pulau Akar masih terdapat kekurangan-kekurangan. Beberapa pembangunan yang sudah menjadi permasalahan sejak lama tidak mampu dituntaskan, padahal pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, pengairan, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif. pemerintah desa sudah melakukan penyusunan agenda apa saja yang akan dilakukan, dengan menampung aspirasi masyarakat, namun memang pelaksanaan dari perumusan masalah kebijakan hingga penyusunan agenda kadang tidak sesuai hal ini dikarenakan, apa yang sudah teridentifikasi di tahap awal, kemudian di saring kembali untuk melihat yang lebih prioritas dan kecukupan dana.

Saran

Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang dan melibatkan masyarakat agar lebih tepat sasaran dan Masyarakat juga lebih aktif dalam berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga menjaga hasil-hasil dari pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Indrio, Suparlan dan Tirta Sudira. 1997. *Kinerja dan Etos Kerja*, Bandung : Penerbit BSSW co.

- Mangkunegara, Anwar. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Masana, Sembiring.2012. Budaya dan Kinerja organisasi (perspektif organisasi pemerintahan).Bandung:FokusMedia
- Maya Rosalina (2013) Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1): 106-120 ISSN 0000-0000 , ejournal.pin.or.id
- Mathis, Robert L., Jhon H. Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Mustopadidjaja. 1993. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara.
- Nanang. F. 1999. Prinsip-prinsip Untuk Kerja Yang Efektif, Jakarta : Rajawali Press.
- Rinah, S. A. (2020). Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 1(2), 174-197.
- Ruky, Akhmad S. 2006. Sistem Manajemen Kinerja(Performance management system):Panduan praktis untuk merancang dan meraih kinerja prima, Jakarta : Gramedia.
- Sedarmayanti. 2004. Good Government (Kepemerintahan yang baik), Bandung : CV. Mandar Maju Bandung, Edisi 2.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. Kinerja Pegawai. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Soeprihanto, John. 2001. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan, Yogyakarta : BPFE
- Sofyanto Torau (2019) Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Jurnal Ilmiah Pranata Edu ISSN : 2656-6788 Volume 1 No. 2, December 2019
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : CV. Alfabeta

- _____. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : CV. Alfabeta
- Surakhman. Pengantar penelitian ilmiah dasar, Bandung : Alumi
- Triguno, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Triton, PB. 2005. Pradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Tugu Publisher.
- Wungu, Jiwo dan Hartanto Brotoharsojo. 2003. Tingkat Kinerja Perusahaan Anda Dengan Merit System. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuwono, Sony dkk. 2005. Penganggaran Sektor Publik. Bayumedia Publishing.
- Zudia, Meirdania. 2010. Analisis Penilaian Kinerja Organisasi dengan Menggunakan Konsep Balanced Scorecard pada PT Bank Jateng Semarang. Skripsi Fakultas Ekonomi UNDIP